

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur“ Oleh Lazarus Timo Olin dengan NIM: 2012-12-260 dibawah bimbingan Bpk. Dr. M.F Arrozi A, SE, M.Si, Akt.

Pengelolaan keuangan Daerah harus menggunakan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output dan menggunakan konsep nilai uang atau *Value for Money* dengan memanfaatkan sumber daya dan biaya yang terendah. Pengelolaan keuangan daerah dengan konsep *value for money* memiliki hubungan dengan kemandirian, pertumbuhan, aktivitas dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* pendapatan dan belanja daerah.

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output dengan menggunakan konsep nilai uang (*Value for Money*) berdasarkan analisis rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*? dan 2). Untuk mengetahui hubungan antara *Value for Money* dengan rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Daerah Kota Kupang tahun 2009 – 2011?

Hasil perhitungan kinerja pemerintah daerah Kota Kupang dilihat dari rasio kemandirian pertumbuhan, aktivitas dan *debt service coverage ratio* menggambarkan penerimaan yang bersumber dari PAD dan bagian lain-lain penerimaan yang sah sangat kecil, sehingga sangat terbatas untuk PEMDA Kota Kupang untuk memenuhi belanja pemerintah daerah baik belanja rutin maupun belanja pembangunan atau dengan kata lain segala kekurangan untuk belanja wajib dan pilihan bersumber dari penerimaan dana perimbangan. Hasil uji hipotesis hubungan antara konsep *value for money* dengan kemandirian, pertumbuhan, aktivitas dan *debt service coverage ratio (DSCR)* pendapatan belanja Daerah Kota Kupang memiliki hubungan arah positif dengan kekuatan hubungan yang berbedah.

Pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan keuangan belum begitu baik, maka dengan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerahnya pada masing-masing kabupaten/kota masih sangat kurang baik karena rendahnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan, dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi. Peningkatan PAD dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan promosi potensi daerah yang ada serta mempermudah Birokrasi Perijinan agar jalur investasi menjadi lancar.

Kata Kunci; *Value for Money*, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan
Debt Service Coverage Ratio

ABSTRAK

Bahasa Inggris